



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2019



BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kata Pengantar



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2015-2019.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja utama, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran untuk perbaikan capaian kinerja ditahun yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Setjen KESDM, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris Jenderal KESDM

Ego Syahrial



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2019	3
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penyajian	5
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.3 Indikator Kinerja Utama	8
2.4 Target Kinerja	9
2.5 Program dan Kegiatan	11
2.6 Strategi	11
2.6.1 Bidang Kepegawaian dan Organisasi	11
2.6.2 Bidang Perencanaan	12
2.6.3 Bidang Keuangan	13
2.6.4 Bidang Hukum	13
2.6.5 Bidang Umum	15
2.6.6 Bidang Data dan Teknologi Informasi ESDM	16
2.6.7 Bidang Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	17
2.6.8 Bidang Pengelolaan BMN	19
2.7 Rencana Kinerja Tahun 2019	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	24
3.2 Capaian Sasaran Strategis	25
3.2.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	25
3.2.2 Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen perubahan	26
3.2.3 Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas perencanaan dan sektor ESDM yang efektif dan efisien	32



3.2.4	Sasaran Strategis IV : Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM	34
3.2.5	Sasaran Strategis V : Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi	43
3.2.6	Sasaran Strategis VI: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien	48
3.2.7	Sasaran Strategis VII: Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap akurat dan tepat waktu	50
3.2.8	Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel.....	53
3.2.9	Sasaran Strategis IX : Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM.....	58
3.3	<i>Akuntabilitas Keuangan</i>	68
Bab IV	Penutup	69
4.1	<i>Capaian Indikator Kinerja</i>	69



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2018	3
Gambar 2. Penyebaran Pegawai Setjen KESDM TA 2018	4
Gambar 3 Pegawai Setjen KESDM TA 2018 Berdasarkan Pendidikan	4
Gambar 4 Pegawai Setjen KESDM TA 2018 Berdasarkan Usia	5
Gambar 5 Siklus Pengelolaan PNBPN	35
Gambar 6 Siklus Aplikasi SIDARA	37
Gambar 7 Bagan Alur SOA KESDM	37
Gambar 8 Aplikasi SUPEL	38
Gambar 9 Aplikasi Geoportal ESDM	51
Gambar 10. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sosialisasi Penetapan Status Penggunaan	55
Gambar 11. Penghargaan Sertifikasi Barang Milik Negara untuk Kementerian ESDM	57
Gambar 12. Pemberitaan Positif, Negatif, Netral pada Media Online dan Media Cetak	60
Gambar 13. Pemberitaan yang disorot oleh Media Online	61
Gambar 14. Pemberitaan Sub Sektor Migas oleh Media Online dan Media Cetak	62
Gambar 15. Lima Belas Isu Utama Media Online	63
Gambar 16. Lima Belas Isu Utama sektor ESDM pada Media Cetak	65
Gambar 17. Sentimen Media Online	67
Gambar 18. Sentimen Media Cetak	67



Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Setjen KESDM	8
Tabel 2. Target Kinerja Sekretariat Jenderal sesuai Rencana Strategis KESDM Tahun 2015 – 2019..	9
Tabel 3. Indikator Pada Sasaran Strategis 1	21
Tabel 4. Indikator Pada Sasaran Strategis 2	21
Tabel 5. Indikator Pada Sasaran Strategis 3	21
Tabel 6. Indikator Pada Sasaran Strategis 4	21
Tabel 7. Indikator Pada Sasaran Strategis 5	22
Tabel 8. Indikator Pada Sasaran Strategis 6	22
Tabel 9. Indikator Pada Sasaran Strategis 7	22
Tabel 10. Indikator Pada Sasaran Strategis 8	22
Tabel 11. Indikator Pada Sasaran Strategis 9	22
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2019	24
Tabel 13. Indikator Pada Sasaran Strategis 1	25
Tabel 14. Indikator Pada Sasaran Strategis 2	26
Tabel 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2015 - 2018	27
Tabel 16. Alokasi Penilaian Komponen dan Sub-komponen	28
Tabel 17. Indikator Pada Sasaran Strategis 3	32
Tabel 18. Indikator Pada Sasaran Strategis 4	34
Tabel 19. Realisasi PNBK KESDM 2019	34
Tabel 20. Realisasi PNBK TA 2019	40
Tabel 21. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	42
Tabel 22. Indikator Pada Sasaran Strategis 5	43
Tabel 23. Pengukuran Kinerja Kegiatan	45
Tabel 24. Pengukuran Kinerja Kegiatan	46
Tabel 25. Indikator Pada Sasaran Strategis 6	49
Tabel 26. Indikator pada Sasaran Strategis 7	50
Tabel 27. Permintaan Layanan Data Non Spasial	51
Tabel 28. Indikator pada Sasaran Strategis 8	53
Tabel 29. Penetapan Status Penggunaan BMN di Kementerian ESDM Tahun 2019	54
Tabel 30. Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2018 dan 2019	55
Tabel 31. Indikator pada Sasaran Strategis 9	58
Tabel 32. Isu Utama yang disorot oleh Media	61
Tabel 33. Realisasi Anggaran per Eselon II	68
Tabel 34. Ringkasan Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019	69



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Jenderal KESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal sebagai pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi unsur-unsur di lingkungan Kementerian ESDM harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal KESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penyusunan peraturan dan advokasi hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal KESDM dalam kurun waktu tahun 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal KESDM yang merupakan unsur pembantu pimpinan,



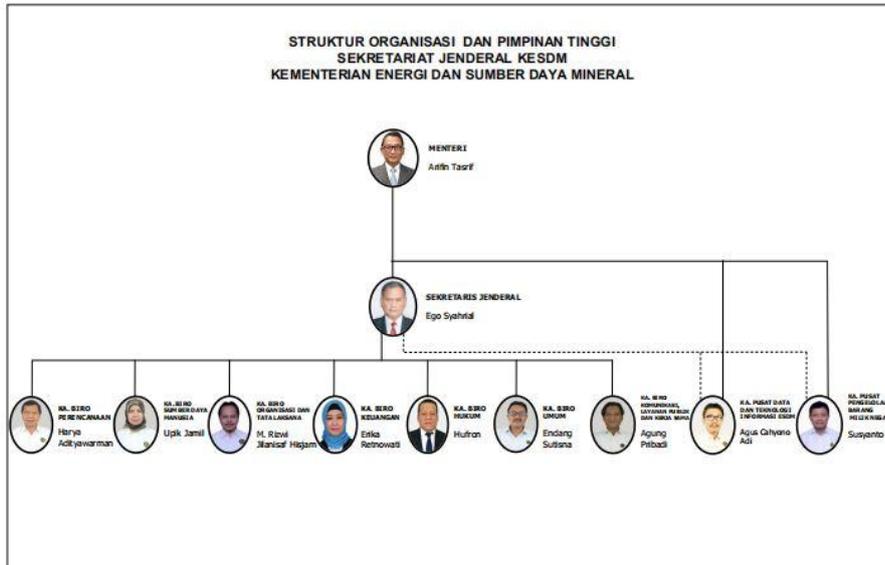
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal KESDM mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal KESDM membawahi 7 Biro dan 2 Pusat yaitu:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Sumber Daya Manusia
3. Biro Organisasi dan Tata Laksana
4. Biro Keuangan
5. Biro Hukum
6. Biro Umum
7. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM
9. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

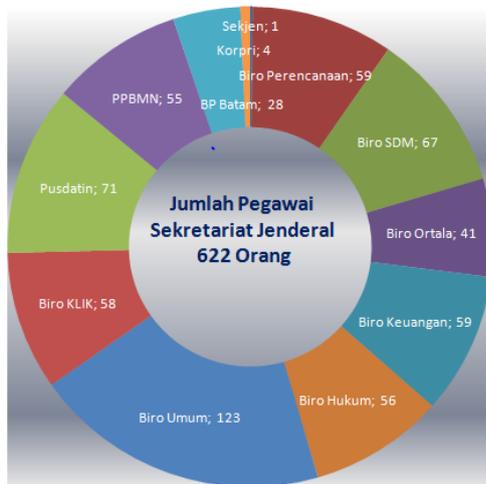
Semua Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:



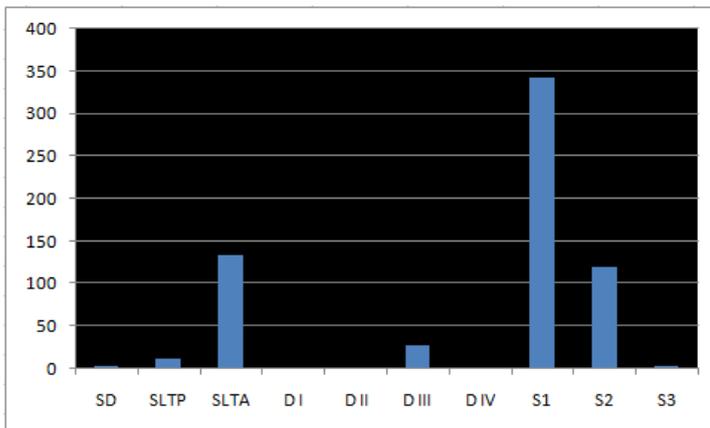
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2019

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2019

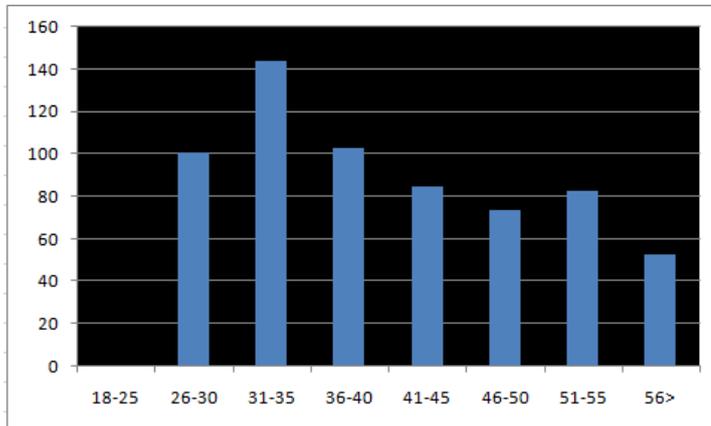
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan akhir Desember 2019 memiliki jumlah pegawai sebanyak 622 orang, yang tersebar di 7 Biro, 2 Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Setjen KESDM per unit Eselon II, berdasarkan usia, dan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Penyebaran Pegawai Setjen KESDM TA 2018



Gambar 3 Pegawai Setjen KESDM TA 2018 Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4 Pegawai Setjen KESDM TA 2018 Berdasarkan Usia

1.4 **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 adalah sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Di samping itu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Menteri ESDM selaku pimpinan Kementerian.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal secara berkelanjutan.

1.5 **Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal KESDM adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal KESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan mengenai Renstra Sekretariat Jenderal untuk periode 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019.



- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja.
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 *Rencana Strategis*

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala serta tantangan yang ada ataupun yang mungkin timbul didalam perjalanannya dalam melaksanakan kegiatan. Sekretariat Jenderal KESDM memfokuskan aktivitasnya pada pelaksanaan 8 sasaran strategis dengan 2 program.

2.2 *Tujuan dan Sasaran Strategis*

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode Renstra. Formulasi tujuan strategis memungkinkan Sekretariat Jenderal untuk mengetahui secara tepat program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran strategis merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal KESDM setiap tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran ini berupa keluaran (output) maupun hasil (outcome) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di Lingkungan KESDM
4. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi
5. Meningkatnya sarana dan prasana aparatur yang efektif dan efisien
6. Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
7. Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel
8. Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM



2.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal KESDM memiliki indikator kinerja utama sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Setjen KESDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi	Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai	%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien	a. Indeks pencapaian Renstra; b. Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM	Indeks Predikat
3.	Terwujudnya administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di Lingkungan KESDM	a. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM; b. Persentase realisasi PNPB terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	Opini %
4.	Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi KESDM	a. Jumlah rancangan peraturan – peraturan perundang – undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional; b. Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Peraturan Buah
5.	Meningkatnya sarana dan prasana aparatur yang efektif dan efisien	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%



6.	Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Peningkatan nilai data ESDM sesuai target	%
7.	Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%
8.	Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM	Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi publik	Indeks

2.4 Target Kinerja

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal yang terdiri dari IKU Sekretariat Jenderal dan IKU Unit Eselon II. Target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, dan dokumen perencanaan lainnya.

Tabel 2. Target Kinerja Sekretariat Jenderal sesuai Rencana Strategis KESDM Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM dan Pengembangan Organisasi							
1	Persentase pembinaan pengelolaan pegawai	%	95	95	96	96	97
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kerja Sama Sektor ESDM yang Efektif dan Efisien							
2	Indeks pencapaian Rencana Strategis	Indeks	70	75	80	85	90
3	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM	Predikat	B	B	B	A	A
Sasaran Strategis : Terwujudnya Administrasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Tepat, Transparan serta Akuntabel di Lingkungan KESDM							
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
KESDM							
5	Persentase realisasi PNBPN terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	90	90	90	90	90
Sasaran strategis : Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi KESDM							
6	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	25	25	25	25	25
7	Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Buah	4	6	6	6	6
Sasaran strategis : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif dan Efisien							
8	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	%	90	90	90	90	90
Sasaran strategis : Meningkatkan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Sektor ESDM yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu							
9	Peningkatan nilai data ESDM sesuai target	%	95	95	95	95	95
Sasaran strategis : Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel							
10	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%	100	100	100	100	100
Sasaran strategis : Meningkatkan Pelayanan Komunikasi Publik Sektor ESDM							
11	Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi publik	Indeks	70	75	80	85	90

*) Target kinerja pada Renstra Sekretariat Jenderal merupakan gambaran umum target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2015 – 2019, namun target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta perubahan kebijakan yang pada akhirnya akan dituangkan dalam perjanjian kinerja



2.5 Program dan Kegiatan

Sekretariat Jenderal KESDM sesuai RPJMN dan Renstra KESDM Tahun 2015 – 2019 melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM.

Kemudian untuk mendukung 2 (dua) Program tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu :

1. Pengelolaan SDM aparatur;
2. pengembangan organisasi KESDM;
3. Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan kerja sama KESDM;
4. Pengelolaan administrasi keuangan KESDM;
5. Pembinaan administrasi hukum KESDM;
6. Pengelolaan administrasi Ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga KESDM;
7. Pengelolaan data dan informasi KESDM;
8. Pengelolaan barang milik negara KESDM;
9. Pelayanan komunikasi publik sektor ESDM;
10. Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

2.6 Strategi

2.6.1 Bidang Kepegawaian dan Organisasi

Pengembangan organisasi dan tata laksana dilakukan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM. Hal ini mengingat aspek kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (business process) merupakan dua dari tiga aspek dalam reformasi birokrasi. Secara umum, pengembangan organisasi dan tata laksana dilakukan melalui upaya restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan dan menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja. Selain itu, dilakukan pula pengembangan jabatan melalui analisis dan evaluasi jabatan.

Peran Sekretariat Jenderal sebagai pembina kepegawaian unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM cukup strategis mengingat reformasi birokrasi menekankan pada penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian. Untuk mencapai target dan sasaran dalam bidang kepegawaian dan organisasi, beberapa strategi akan dilaksanakan, untuk sasaran tersedianya pegawai



negeri sipil yang profesional, netral, sejahtera dan akuntabel, akan dicapai dengan cara melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang didasarkan pada analisis beban kerja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM sedang dan akan terus melaksanakan kegiatan Analisis Beban Kerja yang melibatkan seluruh unit utama.

2.6.2 Bidang Perencanaan

Dalam bidang perencanaan, beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran tersedianya dokumen perencanaan yang sinergis akan dicapai dengan cara melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi internal KESDM yaitu dengan unit-unit di lingkungan KESDM. Kemudian, juga akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi eksternal dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Proses sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan ini merupakan sebuah proses yang tidak mudah, oleh karena itu kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan baik serta memerlukan koordinasi yang intensif dengan seluruh *stakeholders* sektor ESDM.

Sasaran terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja akan dicapai dengan cara menetapkan target kinerja, menetapkan standar biaya serta melaksanakan evaluasi kinerja. Ketiga proses tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan menciptakan sebuah siklus perencanaan yang berkelanjutan, efektif dan efisien. Khususnya pada proses evaluasi kinerja, akan dilaksanakan secara berkala dan melibatkan para *stakeholders*.

Untuk sasaran terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya akan dicapai dengan cara melaksanakan monitoring dan review kegiatan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya secara berkala. Aspek-aspek yang akan dipantau meliputi kesesuaian antara target kinerja dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan ketika merencanakan suatu kegiatan.

Dalam bidang perencanaan akan dilakukan revisi pada Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama, revisi tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja dan dukungan *cascading* IKU hingga ke level individu. Akan dilakukan pula review pada dokumen Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, sehingga dapat menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian ESDM pada tahun 2019. Terdapat penambahan fungsi di dalam bidang perencanaan yaitu fungsi untuk Perencanaan Strategis,



sehingga dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan kajian strategis dengan baik.

2.6.3 Bidang Keuangan

Arah kebijakan Biro Keuangan ditetapkan dalam upaya peningkatan pelayanan Biro Keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuju Biro Keuangan yang unggul (*excellent*). Arah kebijakan tersebut berupa :

- Optimalisasi PNBPN
- Penyerapan anggaran yang optimal dan berkualitas
- Optimalisasi pelayanan perbendaharaan
- Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan

2.6.4 Bidang Hukum

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Program kegiatan dalam area penguatan penataan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum bidang ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektifitas penerapan peraturan perundangundangan. penguatan koordinasi dengan Unit Utama KESDM terutama bagian yang memiliki tugas dan fungsi bidang perundang-undangan maupun dengan Kementerian/ Lembaga terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang lebih implementatif. Arah kebijakan dan Strategi Biro Hukum yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) strategi yang dilakukan dengan perumusan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
2. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron. Strategi yang dilakukan dengan



melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain.

3. Meningkatnya peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakandan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholder*), praktisi dan akademisi.
4. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (regulasi) bidang ESDM melalui website *jdih.esdm.go.id* sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan bidang ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
5. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis.
6. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
7. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien strategi strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi bidang ESDM untuk Tahun 2015-2019.
8. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Biro Hukum guna menunjang tujuan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum ketentuan tersebut diundangkan.
2. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM.



3. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan *stakeholder* terhadap permasalahan hukum yang terjadi.
4. Melakukan analisa dan kajian dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap langkah-langkah yang akan di ambil oleh pimpinan.
5. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi *stakeholder* yang belum menempuh jalur hukum maupun penanganan perkara di sektor ESDM pada lembaga peradilan.

2.6.5 Bidang Umum

Dalam bidang administrasi katatausahaan, perlengkapan serta pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran "terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan penyelamatan arsip KESDM yang bernilai guna vital dan permanen" bisa tercapai dengan menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar kerja bidang persuratan dinas dan kearsipan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan di lingkungan KESDM, melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap unit kerja ketatausahaan di lingkungan KESDM secara terpadu dan berkesinambungan serta optimalisasi Gedung Pusat Arsip KESDM sebagai *record center* dalam rangka perlindungan dan penyelamatan khasanah arsip KESDM yang bernilai guna vital dan permanen.

Untuk sasaran terciptanya kelancaran administrasi dan pengelolaan perlengkapan dapat dicapai dengan cara penyusunan dan penyempurnaan pedoman/ standar kerja dan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan KESDM. Di samping itu pemetaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja Pimpinan KESDM dan aparatur Sekretariat Jenderal KESDM dan distribusi dan inventerisasi BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM.

Dalam hal pencapaian sasaran Terciptanya kelancaran administrasi dan pelayanan kerumahtangan, yang dapat dilakukan penyusunan prosedur/standar kerja dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pimpinan KESDM serta aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal, melaksanakan pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3) dan dukungan operasional perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sasaran terciptanya kelancaran administrasi penjadwalan pimpinan dan pelayanan prima keprotokolan dapat dicapai melalui pelaksanaan penyusunan administrasi penjadwalan pimpinan, melakukan penyusunan/penyempurnaan/penelaahan prosedur dan standar kerja keprotokolan serta melakukan koordinasi



dengan pihak terkait guna kelancaran tugas pimpinan.

Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana kerja pimpinan KESDM dan aparaturnya Sekretariat Jenderal KESDM sesuai dengan standarisasi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

2.6.6 Bidang Data dan Teknologi Informasi ESDM

Dalam bidang data dan informasi ESDM, beberapa strategi akan diterapkan untuk mencapai sasaran yang telah dibahas sebelumnya. Sasaran meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM akan dicapai dengan cara melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, mitra kerja dan *stakeholder* lainnya, mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu dan menyusun regulasi dan pedoman/*Standard Operating Procedure (SOP)* serta meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur.

Sasaran meningkatnya penyajian data dan informasi yang *up to date* akan dicapai melalui pembuatan format data dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain itu, mengembangkan sistem manajemen database ESDM serta membangun sistem pengelolaan data spasial KESDM yang integratif (yang memuat *link* ke seluruh database spasial yang dikelola unit-unit kerja KESDM) sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara *online*. Dalam upaya menyediakan data dan informasi yang akurat adalah membuat regulasi dan pedoman penyelenggaraan *data clearing house* serta melakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dan informasi ESDM secara periodik.

Sasaran meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM akan dicapai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan kajian seperti buku-buku literatur, jaringan internet dan lain-lain; serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait mengenai data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian.

Sasaran meningkatnya ketersediaan (*continuity of service*) infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM dapat dicapai melalui infrastruktur TI sebagai penopang utama integrasi layanan data dan informasi *on-line* di lingkungan KESDM dan lintas kementerian (*National Single Window, JDSN*). Layanan infrastruktur TI yang handal, menjamin pertukaran data berjalan lancar dan berdampak pada sistem pengambilan keputusan yang didukung dengan data-data yang *up to date*.

Selain itu, saat ini Pusdatin menjadi penanggung jawab dalam hal penyusunan kebijakan satu peta (*one map policy*) bidang ESDM. *One Map Policy* adalah kebijakan satu peta skala 1:50.000 di seluruh Indonesia. Saat ini program *one*



map policy yang sudah berjalan di Kementerian ESDM yakni *Minerba One Map Indonesia* (MOMI). MOMI merupakan Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis web sebagai bagian dari semangat transparansi, akuntabilitas dan kolaboratif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem ini merupakan basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia, dimana saat ini MOMI telah terinput 10.338 IUP, 74 PKP2B dan 34 KK.
2. MOMI telah mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain seperti: peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta tersus, peta blok migas dan peta tematik lainnya.
3. MOMI mampu mengintegrasikan data spasial Kementerian/Lembaga dalam satu interface secara bersamaan.
4. MOMI dapat diakses dari manapun dan kapanpun di seluruh dunia.
5. MOMI merupakan salah satu yang aplikasi yang mendukung kebijakan "*one map policy*" Indonesia.

2.6.7 Bidang Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, layanan informasi yang dilakukan oleh Biro KLIK yaitu melalui website esdm.go.id, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan media sosial. Adapun strategi/rencana aksi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Memperbarui tampilan website esdm.go.id agar lebih menarik. Pembaruan website esdm.go.id dimulai pada 2015 dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Pekerjaan yang dilakukan adalah memperbarui *back-end website* dari yang tadinya Joomla menjadi CMS, memperbarui tampilan *front-end* dengan menitikberatkan pada berita dan galeri, dan penambahan tautan ke Twitter resmi Kementerian ESDM.
2. Mengumpulkan semua aplikasi layanan KESDM di halaman utama website www.esdm.go.id untuk memudahkan publik dalam mencari alamat situs maupun info pelayanan. Tujuannya agar pintu pelayanan menjadi satu, sehingga publik tidak perlu menghafal berbagai macam alamat situs pelayanan.
3. Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris. Hal ini dikarenakan pengunjung website esdm.go.id tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan hit berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia.
4. Menyeragamkan tampilan website di bawah domain esdm.go.id agar publik merasa familiar jika mengakses website unit manapun. Keseragaman lebih



ditekankan pada *header*, *body layout*, *footer*, dan konten yang terkandung di dalamnya.

5. Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika keluar, misalnya Blok Masela atau program listrik 35.000 MW.
6. Mempercepat proses LAPOR dan PPID. Perlu ditunjuk PIC LAPOR dan PPID masing-masing unit sehingga mempercepat proses pelayanan informasi.
7. Membangun aplikasi PPID Online untuk mempermudah publik dalam memantau status permohonan informasi. Aplikasi ini dikerjakan dengan bantuan pihak ketiga.
8. Mengelola konten media sosial ESDM (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah infografis, videografis, kuis, dan live tweet dalam setiap kegiatan KESDM. Oleh karena itu dibutuhkan pembelian alat peliputan dan dokumentasi agar dapat mendukung kegiatan tersebut.
9. Pengembangan perpustakaan sebagai *front office* pengetahuan masyarakat di Gedung Heritage Sekretariat Jenderal KESDM.
10. Pengembangan ESDM TV.

Pada tahun 2018, Biro KLIK akan menguatkan penggunaan PPID Online. Secara berkelanjutan, Biro KLIK berencana:

- Memfasilitasi temu media. Biro KLIK akan menjadi fasilitator masing-masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka.
- Mengadakan sarasehan wartawan rutin satu kali tiap satu tahun dengan mengundang perwakilan wartawan dari media cetak dan elektronik. Diharapkan unit-unit KESDM di bawah koordinasi Biro KLIK dapat melakukan temu media seperti sarasehan ini.
- Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM tiap hari Jumat. Jika Menteri ESDM berhalangan hadir, KaBiro KLIK dan perwakilan unit (minimal Pejabat Eselon II) yang akan menjadi narasumber sesuai arahan. Isu strategis disampaikan ke Biro KLIK pada hari Kamis setiap minggunya.
- Meng mendukung prioritas rencana strategis akan dicapai dengan cara menetapkan roadmap kerja sama sektor ESDM yang mengacu pada prioritas dan permasalahan sektor ESDM yang tertuang dalam rencana strategis sehingga ada panduan yang jelas tentang arah dan kebijakan ketika merencanakan kerja sama di sektor ESDM. Kemudian dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati maupun yang sedang



diimplementasikan agar sektor ESDM dapat memperoleh manfaat optimal dari setiap kesepakatan kerja sama yang dihasilkan.

2.6.8 Bidang Pengelolaan BMN

Dalam tataran normatif, arah kebijakan merupakan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM. Kebijakan Kepala Pusat Pengelolaan BMN Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, batasan, petunjuk dan kebijakan bagi seluruh jajaran Pusat Pengelolaan BMN KESDM serta memberikan acuan prioritas optimalisasi sumber daya yang harus dimanfaatkan dan pelaksanaannya secara terstruktur dan sistematis. Arah kebijakan dan Strategi PPBMN yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Realisasi Anggaran, strategi yang dilakukan meliputi : (i) mendorong peningkatan kapasitas pejabat pengelola anggaran, (ii) mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan swakelola dan pengadaan barang/jasa, (iii) mendorong penerapan monitoring anggaran.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja, pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, laporan bmn kpb serta kualitas pelayanan umum dan ketatausahaan. Strategi yang dilakukan meliputi : (i) Peningkatan kapasitas unit akuntansi anggaran dan barang, (ii) Mendorong peningkatan kualitas proses administrasi keuangan dan barang (iii) Penyertaan pegawai pada diklat/seminar dan usul tugas belajar dalam maupun luar negeri.
3. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui : (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala, (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang, (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di bidang ESDM, (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholder* terkait.
4. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala, (ii) Mendorong penggunaan monitoring PSP berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
5. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN



sesuai dengan peraturan yang berlaku (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholder*.

6. Meningkatkan efektifitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* melalui focus group discussion (FGD) (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
7. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah : (i) menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
8. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan adalah (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholder* terkait (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN, (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN, (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
9. Penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi obyek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah (i) Meningkatkan Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN, (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN, (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
11. Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.7 Rencana Kinerja Tahun 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2015-2019, disusun suatu rencana kinerja yang disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, rencana kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2019 merupakan dokumen yang menyajikan



target kinerja untuk tahun 2019. Keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, target dan program tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

Tabel 3. Indikator Pada Sasaran Strategis 1

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM	%	97

Sasaran 2 Meningkatkan kualitas penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen perubahan

Tabel 4. Indikator Pada Sasaran Strategis 2

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi KESDM	Predikat	BB

Sasaran 3 Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien

Tabel 5. Indikator Pada Sasaran Strategis 3

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM	Predikat	BB

Sasaran 4 Terwujudnya administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM

Tabel 6. Indikator Pada Sasaran Strategis 4

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Persentase realisasi PNBK KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	93
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP



KESDM		
-------	--	--

Sasaran 5 Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi KESDM

Tabel 7. Indikator Pada Sasaran Strategis 5

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	30
2	Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Kasus	6

Sasaran 6 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien

Tabel 8. Indikator Pada Sasaran Strategis 6

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> Layanan Umum	%	75

Sasaran 7 Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Tabel 9. Indikator Pada Sasaran Strategis 7

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Pemanfaatan data Spasial dan Non-spasial terintegrasi	%	95

Sasaran 8 Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel

Tabel 10. Indikator Pada Sasaran Strategis 8

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%	95

Sasaran 9 Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM

Tabel 11. Indikator Pada Sasaran Strategis 9

No	Indikator kinerja	Satuan	Target
----	-------------------	--------	--------



1	Jumlah publikasi informasi sektor ESDM	Publikasi	62.150
---	--	-----------	--------



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal KESDM digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal KESDM. Target dan capaian IKU Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2019 adalah sebagai berikut:

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Capaian indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal terdiri dari 11 (sebelas) Indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM	%	97	103	106
2	Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi KESDM	Predikat	BB	BB	100
3	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM	Predikat	BB	BB	100
4	Persentase realisasi PNBK KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	93	115,40	124,10
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	Predikat	WTP	WTP	100
6	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	30	48	160
7	Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Kasus	6	10	167



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> Layanan Umum	%	75	80	106
9	Persentase pemanfaatan data spasial dan non-spasial terintegrasi	%	95	95	100
10	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%	95	100	105
11	Jumlah publikasi informasi sektor ESDM	Publikasi	62.150	117,504	189

3.2 Capaian Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 13. Indikator Pada Sasaran Strategis 1

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM	%	97	-	-	-	-	103	106

Sekretariat Jenderal selaku unit yang mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya aparatur dan pembinaan administrasi mutasi pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilakukan dalam suatu Manajemen



ASN untuk menghasilkan pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, ditetapkan PP 30 Tahun 2019, yang menjadi dasar perubahan sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, dengan metode penyusunan *Balanced Scorecard*.

Tahun 2019, merupakan tahun transisi perubahan sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan KESDM, yang saat ini masih diukur melalui SKP masing-masing individu pegawai, menjadi penilaian kinerja pegawai yang didasarkan pada:

- a. Penilaian Kinerja Organisasi
- b. Penilaian Kinerja Individu

Penyusunan dan penetapan SKP pegawai, harus merupakan penjabaran dari Target Kinerja Organisasi. SKP pegawai disusun sesuai dengan cascading indikator kinerja utama yang tercantum dalam perencanaan kinerja organisasi. SKP dijabarkan melalui target kinerja bulanan pada sistem informasi kinerja pegawai, dengan memperhatikan perilaku kinerja.

- c. Penilaian Perilaku

Penilaian perilaku dilakukan dengan metode 360 derajat, dimana perilaku pegawai dinilai oleh atasan, bawahan, dan rekan sejawat melalui suatu survey tertutup

Saat ini Biro SDM telah menyiapkan sistem penilaian kinerja individu, dengan bekerja sama dengan Biro Perencanaan terkait penilaian kinerja organisasi. Diharapkan pada tahun 2020, sistem ini dapat secara resmi digunakan di seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM dan dijadikan dasar untuk pemberian remunerasi, rotasi mutasi, pengembangan karir dan kompetensi.

Dalam hal penilaian kinerja pegawai, Kementerian ESDM telah melakukan penilaian kinerja kepada sebanyak 6.263 orang pegawai dari target 6080 pegawai (103%).

3.2.2 Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen perubahan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 14. Indikator Pada Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
----	-----------	--------	--------	-----------	---------



	kinerja		2019	2015	2016	2017	2018	2019	(%)
1	Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian ESDM terus meningkat dari tahun 2016 dengan indeks RB 73,58 (BB) menjadi 75,89 (BB) pada tahun 2017, dan 76,61 pada tahun 2018, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2015 - 2018

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAX	NILAI			
			2015	2016	2017	2018
A. PENGUNGKIT						
1	Manajemen Perubahan	5	3,98	2,8	3,42	3,22
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	3,34	3,34	3,34	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,84	4,34	4,34	4,34
4	Penataan Tatalaksana	5	3,47	3,6	3,6	3,42
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,88	13,41	13,48	13,50
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,11	3,65	3,65	3,65
7	Penguatan Pengawasan	12	6,67	6,94	7,48	7,88
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,18	4,13	4,16	4,20
SUB TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT		60	41,46	42,2	43,47	43,55
B. HASIL						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	14,52	15,29	14,87	15,23
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	6,95	7,79	9,08	9,28
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,31	8,57	8,47	8,55
SUB TOTAL KOMPONEN HASIL		40	28,78	31,65	32,42	33,06
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100	70,24	73,85	75,89	76,61

Saat ini, informasi awal dari Tim Penilai RB Kemenpan-RB, nilai Reformasi Birokrasi KESDM tahun 2019 adalah "BB", namun untuk nilai/angka indeks masih menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB.

Metodologi Penilaian Reformasi Birokrasi

A. Metodologi Penilaian mandiri

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "criteria referenced test" dengan cara menilai setiap komponen dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan.



Indikator penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) reformasi birokrasi.

Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

B. Teknik Penilaian

Teknik penilaian pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik penilaian dapat dipilih untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya penilaian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

C. Kertas Kerja Penilaian (KKP)

Pendokumentasian langkah penilaian dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

D. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pengorganisasian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dilakukan oleh asesor RB kementerian, yaitu para Sekretaris Unit Utama. Hasil Penilaian Mandiri dilaporkan oleh pimpinan instansi untuk di submit kepada Kementerian PANRB.

E. Penilaian Mandiri atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
2. Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam LKP.
 - b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator.
 - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 16. Alokasi Penilaian Komponen dan Sub-komponen

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
----	----------	-------	--------------



1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)
Total		100%	

- 3) Setiap sub – komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub – komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan – pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan – pertanyaan atau pernyataan – pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
- 4) Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
- 5) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.
- 6) Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.
- 7) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-



- komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
- b) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - c) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
- c. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:
- d. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB unevaluated), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks RB, Kementerian ESDM telah membangun miniature RB melalui pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan satuan kerja (satker) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian ESDM.

Penetapan Satker WBK atas rekomendasi Kementerian PANRB setelah melalui proses evaluasi dengan melihat kualitas data dukung, hasil survey persepsi kualitas layanan, persepsi korupsi dan verifikasi/wawancara dengan pegawai. Hingga saat telah terdapat 4 satuan kerja yang telah ditetapkan berpredikat WBK tahun 2018, dan sebanyak 5 satker yang dinyatakan LULUS evaluasi tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta untuk meningkatkan Indeks RB, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti KESDM sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RB baru terlihat pada tingkat instansi pusat dan belum menyeluruh kepada seluruh pegawai.
2. Pengembangan *e-Government* yang terintegrasi sepenuhnya.



3. Menyempurnakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja individu dan kinerja organisasi untuk pengembangan karir dan dasar pemberian tunjangan kinerja.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Melengkapi seluruh proses bisnis menjadi SOP dan telah direapkan dan dievaluasi berkala.
6. Mewujudkan budaya kerja positif dengan melibatkan Agen Perubahan di seluruh unit kerja;
7. Mengoptimalkan Tim Reformasi Birokrasi internal melalui pertemuan secara berkala untuk memonitor kemajuan RB.

Selama Tahun Anggaran 2019, dalam rangka meningkatkan nilai RB di Kementerian ESDM dan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi, Bagian Manajemen Perubahan yang terdiri atas Subbagian Perencanaan Program Perubahan, Subbagian Pengembangan Program Perubahan, serta Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Perubahan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan *draft Road Map* RB KESDM Tahun 2020-2024.
2. Monitoring dan Evaluasi *Road Map* RB KESDM Tahun 2015-2019.
3. Monitoring dan Evaluasi Roadmap RB Setjen KESDM 2015-2019.
4. Pembahasan penyusunan Budaya Kerja Kementerian ESDM;
5. Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Nilai-nilai Kementerian ESDM di seluruh Unit Kerja Eselon I.
6. Monitoring dan evaluasi rencana kerja Agen Perubahan.
7. Updating data pelaksanaan RB di seluruh Unit Eselon I;
8. Pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan RB dan penguatan TIM RB internal Unit.
9. Pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
10. Pelaksanaan evaluasi RB unit-unit Kementerian ESDM.
11. Pelaksanaan evaluasi unit-unit yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
12. Koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan RB dan pembangunan ZI.
13. Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta pelaksanaan sosialisasi PIPK.



Strategi ke depan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM, antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan mindset dan culture set yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial.
- b. Penerapan turunan dari nilai-nilai KESDM secara holistik untuk memberikan pemahaman kepada semua ASN DI KESDM
- c. Membangun keselerasan antara program kegiatan dan *quick wins* yang termuat dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi dan program kegiatan serta *quick wins* yang berpotensi tidak terlaksana
- d. Membangun Integritas Organisasi melalui penguatan:
 - Budaya organisasi dan anti korupsi
 - Pengelolaan SDM
 - Pelaksanaan anggaran
 - Pelaksanaan pencairan anggaran secara transparan
 - Budaya organisasi yang akuntabel
 - Pelaksanaan Kinerja individu dan organisasi
- e. Pelaksanaan kegiatan yang bercirikan melayani secara prima.
- f. Mewujudkan kualitas kebijakan yang unggul untuk mewujudkan pencapaian indeks reformasi birokrasi agar lebih baik
- g. Membangun koordinasi dan komunikasi secara intens depan biro dan pusat dalam mengakselerasi pencapaian RB
- h. Memitigasi hambatan baik secara internal dan eksternal lingkungan yang menghambat pencapaian reformasi birokrasi.

3.2.3 Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas perencanaan dan sektor ESDM yang efektif dan efisien

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 17. Indikator Pada Sasaran Strategis 3

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Hasil (nilai) evaluasi	Predikat	BB	-	B	BB	BB	BB	100



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a. Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM

Sesuai PermenPANRB No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Kementerian ESDM melakukan beberapa rangkaian kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dilaporkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Hasil penilaian AKIP Kementerian ESDM Tahun 2018 mendapatkan nilai BB dengan angka 74,82 meningkat dari tahun 2017 yg mendapat nilai BB dengan angka 72,10. Pada proses reviu dan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB menyarankan agar:

- a. Renstra unit Eselon 1 belum dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun)
- b. Cakupan *cascade* IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai SKP
- c. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan
- d. Perlu disampaikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja
- e. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja
- f. Hasil pengukuran capaian PK belum secara nyata dan menyeluruh dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*
- g. Kualitas evaluasi program masih berfokus pada capaian *output* dan penyerapan anggaran dan belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

Untuk penilaian 2019, pimpinan Kementerian ESDM menargetkan penilaian Laporan Kinerja Kementerian ESDM dapat mencapai nilai 80 (A) atau melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM. Hal ini didukung oleh perhatian dari pimpinan dalam mengimplementasikan manajemen



kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Untuk meningkatkan nilai LAKIN, telah dimulai dengan semakin tingginya komitmen dan keterlibatan pimpinan pada seluruh tingkatan untuk mengimplementasikan SAKIP. Selain itu juga dilakukan proses percepatan dan perbaikan di berbagai lini yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengukuran, dan evaluasi dan monitoring kinerja seluruh satuan organisasi di Kementerian ESDM

3.2.4 Sasaran Strategis IV : Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 18. Indikator Pada Sasaran Strategis 4

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase realisasi PNBPN terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	93	59	96	125,37	195,54	115,4	124,1
2	Opini BPK atas Laporan keuangan KESDM	Predikat	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100 %

1. Realisasi PNBPN KESDM

Tabel 19. Realisasi PNBPN KESDM 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TA 2019	Pencapaian Kinerja
Persentase realisasi PNBPN			



KESDM terhadap target yang ditetapkan tahun berjalan	93%	115,4%	124,1%
---	-----	--------	--------

B

erda

sarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengelolaan PNBPN mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi PNBPN. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Keuangan KESDM melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan PNBPN di lingkungan KESDM.

Gambar 5 Siklus Pengelolaan PNBPN

Siklus Pengelolaan PNBPN



Target PNBPN di lingkungan KESDM pada APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp44,82 Triliun. Untuk mencapai target PNBPN yang telah ditetapkan, Biro Keuangan selaku pembina pengelolaan PNBPN di lingkungan KESDM secara umum melakukan kegiatan untuk mengoptimalkan pengelolaan PNBPN antara lain:

1. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN KESDM
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBPN per unit dan per satker berdasarkan potensi PNBPN yang terdapat pada masing-masing unit dan satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN dan APBN-P. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBPN pada setiap unit/satker. Unit/satker yang telah memperoleh penetapan izin



penggunaan PNBP dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBP dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.

2. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBP SDA

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBP SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.

3. Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP

Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan KESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBP dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Biro Keuangan memanfaatkan SIDARA sebagai sarana monitoring realisasi PNBP secara periodik, dengan mendorong keaktifan unit/satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBP. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan database realisasi PNBP di lingkungan KESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

4. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA

Terhadap realisasi PNBP SDA, Biro Keuangan melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBP dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke pemerintah daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA tersebut, Biro Keuangan mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBP SDA per daerah penghasil.

5. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBP

Biro Keuangan membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat monitoring realisasi PNBP secara online. Selain itu, Biro Keuangan membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBP SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBP oleh pimpinan



dan para pengelola PNBP di lingkungan KESDM, Biro Keuangan KESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal KESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018.

Gambar 6 Siklus Aplikasi SIDARA

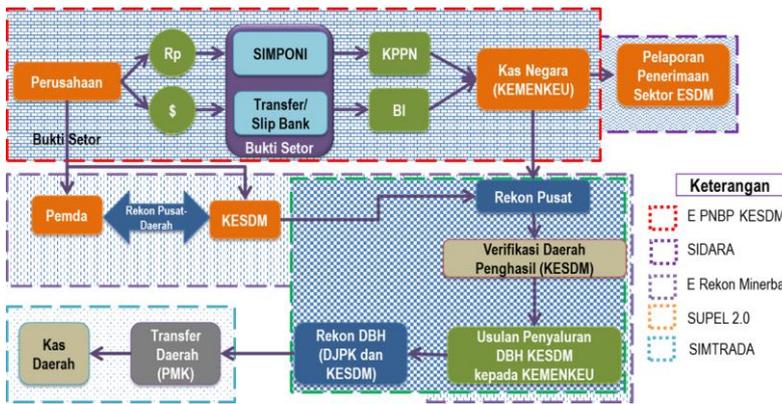
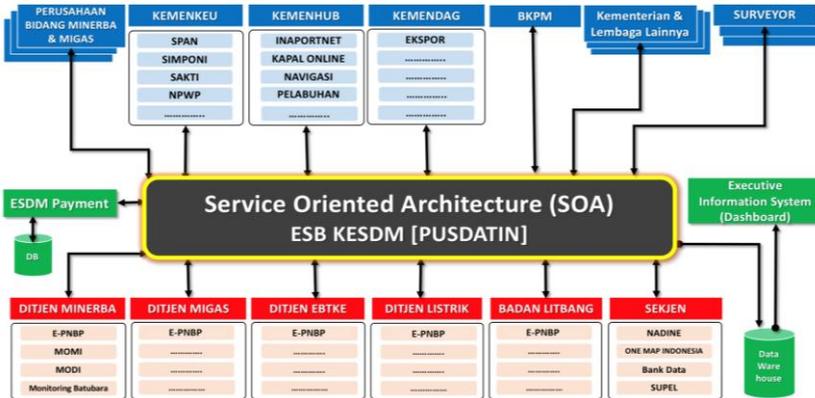


Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, Biro Keuangan mendorong, menginisiasi dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBP pada unit penghasil PNBP secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah. Sampai dengan tahun 2019, E-PNBP Minerba pada Ditjen. Mineral dan Batubara telah diluncurkan dan digunakan oleh para *stakeholder* dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara. Selain itu, terdapat E-PNBP EBTKE pada Ditjen. EBTKE yang telah dilaksanakan pengujian dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan para *stakeholder* terkait. Pembangunan E-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (SIMPONI). Pengembangan E-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para *stakeholder*.

Gambar 7 Bagan Alur SOA KESDM



Service Oriented Architecture Kementerian ESDM



- Keterangan**
- E PNBP KESDM
 - SIDARA
 - E Rekon Minerba
 - SUPEL 2.0
 - SIMTRADA

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan KESDM, Biro Keuangan telah membangun dan mengembangkan SUPEL yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perperhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan Kementerian ESDM.

Gambar 8 Aplikasi SUPEL



6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP

Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNBP. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNBP serta evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA. Evaluasi penatausahaan PNBP mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBP, penyetoran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBP serta pelaporan PNBP. Evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA mencakup evaluasi target PNBP SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.

7. Pembinaan pengelolaan PNBP di lingkungan KESDM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBP terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNBP. Pada kegiatan ini Biro Keuangan juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBP. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBP juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBP dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

8. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan bidang PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBP dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini



dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBP.

9. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBP di lingkungan KESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.

10. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBP

- a) Kementerian ESDM telah menyusun dan melaksanakan Surat Edaran Nomor 0010 E/82/SJN.H/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) Kementerian ESDM telah menyusun dan melaksanakan Surat Edaran Nomor 0011 E/SJN.K/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, dan Panas Bumi;
- c) Kementerian ESDM telah menyusun dan melaksanakan Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian realisasi PNBP TA. 2019 sebesar Rp51.724.513.255.420,00 atau 115,41% dari target PNBP sebesar Rp44.816.846.135.557,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi PNBP TA 2019

No	Eselon I	Target PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	9.738.388.000	13.456.183.216	138,18%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	30.000.000	446.155.900	1487,19%
3	DITJEN MIGAS	50.625.000.000	4.629.145.009.102	9143,99%
4	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	220.000.000	23.780.281.314	10809,22%
5	DITJEN MINERBA	43.279.328.932.197	45.183.386.213.385	104,40%
6	SETJEN DEN	-	549.329.255	-
7	BPSDM ESDM	214.599.206.800	200.937.188.229	93,63%
8	BADAN GEOLOGI	2.228.420.000	9.172.093.319	411,60%
9	BPH MIGAS	950.000.000.000	1.319.603.150.032	138,91%
10	DITJEN EBTKE	32.226.188.560	162.701.817.612	504,87%
11	BALITBANG ESDM	277.850.000.000	181.335.834.056	65,26%
	Total	44.816.846.135.557	51.724.513.255.420	115,41%

Sumber:
SIDARA diakses per 7 Januari 2020



Capaian realisasi PNBP yang dicatat pada Kementerian ESDM (BA 020) melebihi target dikarenakan sebagai berikut:

1. Pada Setjen capaian realisasi PNBP melebihi target dikarenakan Penerimaan dari pemasyarakatan data migas oleh perusahaan Survey Umum;
2. Pada Itjen capaian realisasi PNBP melebihi target dikarenakan terdapat Penerimaan Kembali Belanja TAYL mencapai Rp354 Juta (79% dari total realisasi PNBP Itjen);
3. Pada Ditjen Migas capaian realisasi PNBP melebihi target dikarenakan terdapat Penerimaan Kembali Belanja TAYL sebesar Rp59,65 Miliar dan penerimaan dari Signature Bonus, *bid document* dan *firm commitment* senilai Rp4,56 Triliun;
4. Pada Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) capaian realisasi didominasi Penerimaan Kembali Belanja TAYL sebesar Rp19,98 Miliar (84% dari total realisasi Ditjen Gatrik);
5. Pada Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) capaian realisasi melebihi target dikarenakan terdapat kenaikan harga acuan batubara dan kenaikan kurs.
6. Pada Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) capaian penerimaan SDA panas bumi tercapai sebesar Rp37,29 Miliar dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL sebesar Rp111,7 Miliar serta Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp13,5 Miliar;
7. Pada Badan Geologi capaian realisasi PNBP melebihi target PNBP yang ditetapkan dikarenakan terdapat realisasi PNBP Umum sebesar Rp6,95 Miliar;
8. Pada BPH Migas capaian realisasi PNBP melebihi target dikarenakan kenaikan penetapan Badan Usaha dari tahun sebelumnya dan pembayaran atas kurang bayar PNBP oleh Badan Usaha.

Biro Keuangan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam lingkup pelayanan bidang keuangan di lingkungan KESDM dengan menerapkan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Biro Keuangan telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sejak 13 November tahun 2017 dengan audit oleh lembaga sertifikasi TUV NORD Indonesia. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, Biro Keuangan antara lain melakukan inventarisasi dan memperbaharui beberapa SOP bidang keuangan yaitu SOP pengelolaan Penerimaan PNBP sektor ESDM, SOP terkait perbendaharaan, SOP terkait pelaksanaan anggaran belanja, dan SOP lainnya dibidang keuangan dengan sedapat mungkin memotong rantai birokrasi tanpa



melanggar aturan sehingga dihasilkan standar operasi yang efisien dan efektif.

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Tabel 21. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TA 2018	Pencapaian Kinerja
Opini BPK atas Laporan keuangan KESDM	WTP	WTP	100%

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 Jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada Kementerian/Lembaga yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*). Pada tahun 2019, Kementerian ESDM mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2018 yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2019 masih dalam proses dan baru akan terbit pada bulan Mei 2020. Pada indikator Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kementerian ESDM diharapkan dapat mempertahankan kembali prestasi tertinggi yaitu WTP dengan



menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material. Untuk mendukung target tersebut didapatkan dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis E-Rekon Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- c. Koordinasi Penerapan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
- d. Penyusunan Laporan Keuangan KESDM BA 020 (Semester I dan II)
- e. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat KESDM

3.2.5 Sasaran Strategis V : Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2018. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Indikator Pada Sasaran Strategis 5

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi					Capaian (%)
			2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	30	59	51	65	56	48	160
2	Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses	Kasus	6	17	24	24	24	10	166,67



penyelesaian									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana diketahui bahwa untuk tahun 2019 Biro Hukum melalui Perjanjian Kinerja (PK) baik dengan Sekjen KESDM maupun PK Sekjen dengan Bapak Menteri telah menetapkan 2 Indikator Utama guna mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi KESDM, yaitu jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional dan jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian.

Dari matriks capaian kinerja Biro Hukum di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja Biro Hukum tahun 2019 melalui dua Indikator Kinerja tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam PK, baik PK antara Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Jenderal maupun PK Sekretaris Jenderal dengan Menteri ESDM. Untuk kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, tahun 2019, Biro Hukum telah memproses sebanyak 48 peraturan perundang-undangan dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 peraturan, turun sebanyak 8 peraturan bila dibandingkan capaian tahun 2018 sebanyak 56 peraturan. Sementara itu, untuk pelaksanaan advokasi terhadap permasalahan hukum yang masuk di Kementerian ESDM, Biro Hukum telah melakukan bantuan hukum/advokasi terhadap 10 kasus/perkara yang dikategorikan sebagai kasus yang bersifat prioritas nasional. Apabila dilihat dari seluruh kasus yang masuk (termasuk yang bukan prioritas nasional), Biro Hukum di tahun 2019 telah menangani atau memberikan bantuan hukum terhadap 37 kasus, yang tersebar di berbagai pengadilan, baik Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, MA maupun Arbitrasi/Bani. Apabila dibandingkan dengan penanganan kasus di tahun lalu, jumlah kasus yang ditangani oleh Biro Hukum secara keseluruhan meningkat sebanyak 13 kasus.

Kenaikan realisasi yang cukup signifikan tersebut bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, khususnya dalam kegiatan advokasi, dikarenakan antara lain adanya beberapa permasalahan yang timbul secara tidak terduga dan menyebabkan adanya gugatan kepada Kementerian ESDM.

1. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional



Dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan target untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019 sebanyak 30 Rancangan, dengan rincian, 15 rancangan untuk bidang Minyak dan Gas Bumi, kelistrikan dan EBTKE, dan 15 rancangan untuk bidang Mineral Batubara, Geologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Pengembangan, Setjen dan Itjen. Sampai akhir tahun 2019, pada kenyataannya, Biro Hukum telah memproses sebanyak 48 rancangan peraturan perundang-undangan, dengan rincian 1 Rancangan Undang-undang (Migas), 3 Rancangan Peraturan Pemerintah, 6 Rancangan Peraturan Presiden dan 38 Rancangan Peraturan Menteri ESDM. Dari 48 rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diproses, sebanyak 27 rancangan telah ditetapkan menjadi peraturan, yaitu sebanyak 4 Peraturan Presiden dan 23 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari rancangan yang belum ditetapkan yaitu sebanyak 21 rancangan, 4 diantaranya pada prinsipnya sudah selesai pembahasannya di Kementerian ESDM namun masih dalam proses di tingkat kementerian lain atau proses persetujuan Presiden atau telah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM namun dikembalikan di unit teknis untuk disesuaikan dengan kebijakan Menteri, sedangkan sisanya masih dalam proses pembahasan atau proses persetujuan Menteri.

Tabel 23. Pengukuran Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan dan EBTKE	Rancangan	15	29	193,3%
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara,	Rancangan	15	19	126,60%



No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Geologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Pengembangan, Setjen dan Itjen				

Pada umumnya kenaikan realisasi jumlah rancangan yang ditangani oleh Biro Hukum disebabkan adanya beberapa rancangan Peraturan Menteri yang menjadi prioritas namun tidak/belum dimasukkan dalam prolegnas yang telah ditetapkan, dan rancangan-rancangan tersebut merupakan amanat atau kebijakan pimpinan/Menteri yang harus segera dibuat/diselesaikan guna mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan situasi peraturan atau kegiatan usaha yang ada dan sedang berjalan di Kementerian ESDM. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, jumlah realisasi peraturan perundang-undangan yang ditangani oleh Biro Hukum tahun 2019 tampak menurun/lebih kecil. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan deregulasi yang ditetapkan oleh Presiden dalam rangka memangkas birokrasi dan lebih meningkatkan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk kedepannya, dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas melalui pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum akan lebih meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait di Kementerian ESDM sehingga dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan lebih baik.

2. Jumlah permasalahan hukum Kementerian ESDM yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian

Tabel 24. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang minyak dan gas bumi dan badan	Kasus	2	4	200%



Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang minyak dan gas bumi dan badan	Layanan	2	3	150%
Pelaksanaan advokasi dan koordinasi bantuan hukum bidang mineral dan batubara	Layanan	2	3	150%

Untuk tahun 2019, Biro Hukum sesuai dengan Perjanjian Kinerja telah menargetkan kasus yang akan ditangani yang bersifat prioritas nasional sebanyak 6 kasus dengan rincian 2 kasus untuk bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 2 kasus untuk bidang Ketenagalistrikan dan 2 kasus untuk bidang Mineral dan Batubara. Pada kenyataannya, sampai akhir tahun 2019, Biro Hukum telah menangani atau memberikan advokasi hukum secara keseluruhan sebanyak 37 kasus, dengan rincian 11 kasus bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 7 kasus bidang Ketenagalistrikan dan 19 kasus bidang Mineral dan Batubara. Namun demikian tidak semua kasus yang ditangani oleh Biro Hukum tersebut kesemuanya bersifat prioritas nasional. Dari 37 kasus dimaksud, 10 kasus diantaranya merupakan kasus yang bersifat prioritas nasional, dengan rincian 4 kasus di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 3 kasus di bidang ketenagalistrikan dan 3 kasus di bidang mineral dan batubara.

Dari 10 kasus yang bersifat prioritas nasional tersebut, 5 kasus diantaranya telah mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan dimenangkan oleh Kementerian ESDM, dengan rincian 2 kasus di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 2 kasus di bidang Ketenagalistrikan dan 1 kasus di bidang Mineral dan Batubara. Sementara itu, 5 kasus lainnya masih dalam proses di pengadilan.

Dilihat dari keseluruhan kasus yang ditangani Biro Hukum yaitu sebanyak 37 kasus, 20 kasus diantaranya telah selesai (*inkracht*), dengan rincian 18 kasus telah dimenangkan oleh Kementerian ESDM, 1 kasus gugur dan 1 kasus masih menunggu pemberitahuan putusan dari Pengadilan tingkat kasasi. Selanjutnya, dari 20 kasus yang telah dimenangkan oleh Kementerian ESDM tersebut, 4 kasus diantaranya merupakan kasus di bidang Ketenagalistrikan, 10 kasus di bidang mineral dan batubara dan 6 kasus di bidang minyak dan gas bumi dan badan. Sementara itu kasus yang masih berjalan di tingkat banding sebanyak 6 kasus, dengan rincian 1 kasus, di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 1 kasus di bidang ketenagalistrikan dan 4 kasus di bidang Mineral dan Batubara. Dari 6 kasus tersebut, 4 kasus diantaranya sudah memasuki tingkat kasasi/MA dan pada tingkat banding



keempatnya telah dimenangkan oleh Kementerian ESDM.

Sementara itu, dari seluruh 37 kasus yang ditangani, 11 kasus masih dalam proses pengadilan tingkat pertama, yang terdiri, 4 kasus di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Badan, 2 kasus di bidang Ketenagalistrikan dan 5 kasus di bidang mMineral dan Batubara.

Pada prinsipnya, Biro Hukum selalu berharap untuk setiap tahunnya agar tidak banyak atau seminimal mungkin kasus yang masuk karena diharapkan dengan segala peraturan dan kebijakan yang ada dan telah diterbitkan, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari terutama masalah hukum di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Biro Hukum tidak banyak menargetkan kasus yang akan masuk di Kementerian ESDM atau yang akan ditangani. Namun demikian, untuk tahun 2019, kasus yang masuk melebihi target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena Biro Hukum tidak pernah bisa memprediksi apa atau berapa kasus atau gugatan yang akan masuk di Kementerian ESDM. Disamping hal tersebut kadang-kadang terjadi permasalahan di luar kendala dan dugaan kita yang menyebabkan adanya gugatan kepada Kementerian ESDM, misalnya adanya *black out* atau pemadaman listrik secara mendadak yang terjadi pada bulan Agustus 2019 di sebagian besar Wilayah DKI, Jawa barat dan sebagian kecil Jawa Tengah yang menyebabkan dilayangkannya gugatan dari berbagai elemen/kelompok masyarakat yang terdampak pemadaman listrik tersebut kepada PT PLN (Persero) sebagai Tergugat dan kepada Kementerian ESDM sebagai Turut Tergugat.

Dalam rangka mengantisipasi penanganan kasus yang masuk di Kementerian ESDM, Biro Hukum akan senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit terkait di Kementerian ESDM dan Kementerian/lembaga lain yang terkait. Disamping hal tersebut, dengan telah dilakukannya deregulasi maupun penataan peraturan perundang-undangan sektor ESDM, diharapkan untuk kedepannya hal tersebut dapat lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM sehingga tidak banyak lagi permasalahan hukum di pengadilan yang masuk ke Kementerian ESDM.

3.2.6 Sasaran Strategis VI: Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2018. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 25. Indikator Pada Sasaran Strategis 6

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi					Capaian (%)
			2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Indeks Kepuasan Stakeholder Layanan Umum	%	75	84	92,3	92,85	92,85	80	103,16

Bisnis inti dari unit kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal KESDM adalah layanan umum. Pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Biro Umum sebagai Instansi Pemerintah Pusat.

Layanan Umum yang diselenggarakan Biro Umum, termasuk meliputi Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka selatan Nomor 18, Jakarta Pusat. Pada tahun anggaran 2019, bidang layanan umum yang mendapatkan aspek penilaian untuk mengukur indeks kepuasan layanan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan korespondensi di lingkungan Kantor Pusat KESDM;
2. Pelayanan perlengkapan kantor di lingkungan Kantor Pusat KESDM;
3. Pelayanan penyelenggaraan event/rapat-rapat di lingkungan Kantor Pusat KESDM, Gedung Pusat Arsip, Wisma Bayu dan Wisma Energi;
4. Pelayanan keamanan, kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Pusat KESDM, Gedung Pusat Arsip, Wisma Bayu dan Wisma Energi;
5. Pelayanan Klinik Kesehatan Sekretariat Jenderal KESDM.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Biro Umum untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kinerjanya di masa mendatang. Atas dasar hal tersebut, diambil langkah-langkah penting sebagai solusi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan dan rekomendasi serta bahan pertimbangan untuk tahun-tahun mendatang. Berikut langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia Biro Umum, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;



3. Mengoptimalkan pengalokasian sumber daya manusia maupun sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. Perlu dilaksanakannya studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal KESDM maupun unit/instansi eksternal KESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media Bagi Biro Umum untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Perlu adanya langkah-langkah untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Biro Umum, baik dari segi kelembagaan maupun manajemen sumber daya manusia yang ditunjang dengan penerapan manajemen berbasis kinerja secara komprehensif;
6. Mempersiapkan dan mematangkan perencanaan yang mendukung pelaksanaan setiap kegiatan;
7. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja, sasaran-sasaran strategis maupun cara-cara pengukuran dan evaluasi kinerja sehingga dapat dicapai tingkat keberhasilan yang lebih berkualitas.

3.2.7 Sasaran Strategis VII: Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap akurat dan tepat waktu

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Indikator pada Sasaran Strategis 7

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Spasial dan Non Spasial Terintegrasi	%	95					95	100



Pemanfaatan Data Spasial Sektor ESDM yang ada dalam Geoportal ESDM sangat bermanfaat bagi *stakeholder* dan masyarakat, ditunjukkan dengan angka *hit visitor* per Januari 2020 sebesar 888.526 pengunjung. Pemanfaatan Teknologi informasi ESDM One Map melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara online yang ditampilkan pada web *ESDM One Map* dengan total Jumlah responden 284 orang, dari seluruh Indonesia diantaranya 273 berjenis kelamin laki- laki dan 21 perempuan dengan 19 pertanyaan yang mencakup 4 variabel yaitu : *ESDM One Map usability*, *ESDM One Map Information*, *Layanan Helpdesk One Map*, *Layanan One Map* Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan termasuk dalam kategori sangat baik.

Gambar 9 Aplikasi Geoportal ESDM



Data spasial di dalam ESDM One Map dimanfaatkan seluruhnya terbukti dari jumlah hit setiap peta dari total 103 peta dan dapat diakses oleh publik secara gratis.

Pemanfaatan Data Non Spasial Tahun 2019 terdapat 12 permintaan layanan data terdapat 5235 item permintaan dan terpenuhi 4758 data. Dengan presentase pemanfaatan data sebesar 90.8 %.

Tabel 27. Permintaan Layanan Data Non Spasial

Instansi	Tanggal	Jumlah Item Permintaan Data	Data Tersedia
----------	---------	--------------------------------	------------------



SKK MIGAS	13-May-19	755	755
SKK MIGAS	28 –Mei-19	2018	2018
SKK MIGAS	2-Jul-19	315	315
"UGM (Winda Putri Anggareni)"	23-Apr-19	21	20
PPPGL	18-Dec-18	890	844
ITB (Arif Hidayat)	27-May-19	73	71
Universitas Brawijaya BGF 2019	22-Jul-19	76	76
ITB (Wisnu Wijaya Jati)	13-Aug-19	17	16
UNPAD (Syaiful Alam & Djadjang Jedi Setiadi)	30-Aug-19	178	154
UGM (Andrea Hasbullah)	28-Aug-19	108	108
PSG	4-Sep-19 4-Dec-19 23-Sep-19 14-Oct-19 1-Nov-19	626	98
UPN "Veteran" Yogyakarta (Adiguna Candrawisesa Heriwijaya & Agra Adipta)	15-Nov-19	107	-
TOTAL		5235	4758
PRESENTASE			90.8 %

Evaluasi terhadap capaian 2019 adalah menjaga dan meningkatkan pemanfaatan data baik data spasial maupun data non spasial. Perlu adanya integrasi dan penyeragaman antara data spasial dan non spasial untuk mewujudkan kualitas data yang *reliable*. Pengelolaan data harus dilakukan dalam satu kesatuan utuh antara data spasial maupun data non spasial.

Upaya ke depan yang akan dilakukan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas data baik data spasial maupun data non spasial. Integrasi data spasial dan non spasial. Validasi data spasial bersama unit-unit walidata dan bersama unit melakukan evaluasi terhadap penggunaan ESDM *One Map* lebih jauh untuk bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

Commented [HD1]: Tolong dijelaskan evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2018 dengan tahun 2019

Commented [HD2]: Tolong dijelaskan upaya ke depan yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan seterusnya



3.2.8 Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Indikator pada Sasaran Strategis 8

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%	95	95	98	100	100	100	105,2

Dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel di Lingkungan Kementerian ESDM, seluruh BMN yang tercatat dalam Neraca Kementerian ESDM harus ditetapkan status penggunaannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 246/PMK.06/2014 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 87/PMK.06/2016. Selain itu, tujuan penetapan status penggunaan juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna/kuasa pengguna barang atas penggunaan BMN di Lingkungan Kementerian ESDM.

Sekretariat Jenderal sebagai pelaksana fungsional pengguna barang pada Kementerian ESDM melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, tugas fungsi tersebut diantaranya melaksanakan proses penetapan status BMN di Lingkungan Kementerian ESDM.

Tahun 2019, Sekretariat Jenderal telah menetapkan presentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya sebanyak 95 %. Indikator ini memiliki sifat tahunan, sehingga pencapaian indikator ini dapat dilihat secara menyeluruh pada akhir tahun.

Pada tahun 2019, indikator tersebut terealisasi sebanyak 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator BMN yang telah ditetapkan statusnya sebanyak 105,2% . Angka



pencapaian 100% itu dicapai dari 93 Usulan Penetapan status BMN dari seluruh unit eselon I di Kementerian ESDM dibandingkan dengan realisasi penetapan status telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 93 dokumen. Usulan masuk yang terdaftar dan usulan yang di proses penetapan status penggunaannya tersaji pada table berikut:

. Tabel 29 Penetapan Status Penggunaan BMN di Kementerian ESDM Tahun 2019

No	Unit Eselon I	Usulan Masuk (Dokumen)	Usulan yang diproses (Dokumen)	Nilai BMN (Rp)
1	Setjen	3	3	4.270.002.750
2	Itjen	3	3	3.742.135.565
3	BPSDM	25	25	188.714.074.489
4	Balitbang	7	7	575.020.687.182
5	Bageol	21	21	168.033.691.695
6	DJK	16	16	103.014.310.995
7	DitjenMigas	9	9	193.958.800.510
8	DitjenMinerba	2	2	4.251.136.443
9	Ditjen EBTKE	6	6	85.252.759.451
10	DEN	1	1	679.546.448
11	BPH Migas	0	0	0
	TOTAL	93	93	1.312.095.958.527

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian realisasi di tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebanyak 105,2%, hanya saja satuan pembandingan realisasi tersebut mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018, usulan yang masuk dari Eselon I sebanyak 82 usulan dan ditindaklanjuti dan diselesaikan juga sebanyak 82 usulan, sementara di tahun 2019 usulan yang masuk sebanyak 93 usulan dan ditindaklanjuti diselesaikan sebanyak 93 juga.

Secara umum, terjadi kenaikan jumlah dokumen usulan, namun disisi lain nilai BMN yang diusulkan untuk ditetapkan status penggunaannya mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Jumlah usulan penetapan status BMN di Lingkungan Kementerian ESDM sebanyak 82 usulan dengan nilai 2,4 T, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 93 usulan dengan nilai 1,3 T.

Jumlah usulan terbanyak berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebanyak 25 usulan. Namun dari jumlah usulan tersebut Jumlah BMN yang ditetapkan terbanyak dari Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM sebanyak Rp575.020.687.182, dari jumlah keseluruhan yang telah ditetapkan sebanyak



Rp1.312.095.958.527. sebagaimana tersaji pada tabel di atas.

Tabel 30 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2018 dan 2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2018	95	100	105,2	212.152.000	212.152.000	100
2019	95	100	105,2	290.768.000	290.768.000	100

Jika dibandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran antara tahun 2018 dan tahun 2019, anggaran yang digunakan lebih banyak di tahun 2019 dengan realisasi capaian yang sama. Artinya dengan penambahan anggaran realisasi capaian kinerja juga sama. Artinya penambahan anggaran di tahun 2019 untuk indikator tersebut, kurang efisien. Sedangkan untuk Analisa efektifitas di bandingkan dengan jumlah anggota tim 2019 dan 2018.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target diantaranya adalah:

- Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sosialisasi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian ESDM Untuk mendorong pencapaian target penetapan status penggunaan BMN, telah dilaksanakan rekonsiliasi dan sosialisasi pada tanggal 25 s.d. 27 September 2019 di Ruang Rapat Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Pengelola BMN dari KPKNL Bandung dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM.

Gambar 10. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sosialisasi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian ESDM



- Pembentukan Tim Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian ESDM
Untuk mendorong pencapaian target penetapan status penggunaan, telah dibentuk tim



penetapan status BMN yang bertugas selama 10 bulan dengan tugas sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data, pembinaan, pembukuan, dan penetapan status barang milik negara di Lingkungan Kementerian ESDM secara terpadu, tertib dan teratur sehingga dapat dijadikan sumber data dan informasi;
- b. Melakukan penetapan status penggunaan, revaluasi dan evaluasi atas pengelolaan barang milik negara di lingkungan KESDM;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KESDM dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara;
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan KESDM dalam rangka penetapan status penggunaan BMN di lingkungan KESDM;
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Pusat Pengelolaan BMN KESDM paling lambat satu bulan setelah masa kerja Tim berakhir.

Beberapa upaya perbaikan kedepan dalam pencapaian target Presentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya diantaranya adalah:

- Percepatan proses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sangat tergantung dari kelengkapan dokumen usulan PSP, serta komitmen dari seluruh *stakeholders* untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu Memberikan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja mengenai peraturan perundang – undangan tentang Barang Milik Negara, serta selalu memonitor proses penetapan status penggunaan baik yang ditetapkan oleh Menteri ESDM maupun Menteri Keuangan.
- Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Tim dapat tercapai melalui kerjasama antara anggota Tim, untuk itu perlu pengawasan pelaksanaan tugas oleh penanggungjawab dan ketua Tim juga perlu Penggunaan Sumber Daya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya pendukung seperti anggaran sudah cukup memadai.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada tahun 2019 meraih juara 1 kategori sertifikasi BMN berupa tanah pada ajang BMN awards yang dilangsungkan oleh Kementerian Keuangan. Selama tahun 2018-2019 Kementerian ESDM dianggap berkinerja baik dalam hal pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN sertifikasi berupa tanah.

Penghargaan tersebut diberikan kepada 39 K/L yang memiliki kinerja terbaik dalam lima kategori BMN Awards. Lima kategori tersebut yakni (1) utilisasi BMN, (2) kualitas pelaporan BMN, (3) sertifikasi BMN berupa tanah, (4) peningkatan tata kelola



berkelanjutan (*continuous improvement*), dan (5) kerjasama tata kelola antar K/L (*peer collaboration*), yang dibagi tiga kelompok :

1. Kelompok 1, yaitu K/L yang memiliki 1 s.d. 10 satuan kerja
2. Kelompok 2, yaitu K/L yang memiliki 11 s.d. 100 satuan kerja.
3. Kelompok 3, yaitu K/L yang memiliki satuan kerja lebih dari 100 satuan kerja.

Kategori Sertifikasi BMN berupa tanah, diberikan untuk K/L yang telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Kementerian ESDM meraih predikat juara 1 di kelompok 2 bersama dengan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Sabang di kelompok 1 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia di kelompok 3.

Sertifikasi tanah merupakan hal penting dalam pengelolaan aset negara, terutama dalam mendukung pengamanan dan tertib administrasi, hukum serta fisik. Kementerian Keuangan sendiri menargetkan seluruh tanah negara telah bersertifikat di Tahun 2022.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penggunaan BMN yang baik merupakan satu *milestone* yang penting di dalam pengelolaan keuangan negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional.

Gambar 11. Penghargaan Sertifikasi Barang Milik Negara untuk Kementerian ESDM





3.2.9 Sasaran Strategis IX : Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2019. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Indikator pada Sasaran Strategis 9

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi					Capaian (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Jumlah Publikasi Informasi sektor ESDM	publikasi	62.150	-	-	-	112,320	117.504	190

Publikasi kreatif menjadi kegiatan yang penting dalam era globalisasi saat ini. Informasi-informasi yang ada dikemas dalam bentuk yang menarik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Pemerintah sebagai regulator yang mengatur segala kepentingan masyarakat perlu untuk membuat skema publikasi yang menarik bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan publikasi secara luas adalah untuk menghindari asimetris informasi yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, jenis publikasi saat ini sangat beragam. Berbagai media dan bentuk penyampaian informasi menjadi ruang kreatifitas tersendiri dalam penyampaian informasi. Kemudahan penyampaian informasi dalam bentuk visual maupun audiovisual membuat setiap orang dapat mempublikasikan apapun dan dimanapun. Dengan berbagai kemudahan untuk mempublikasikan informasi saat ini, maka pemerintah perlu untuk melakukan inovasi dalam melakukan publikasi terkait kebijakan, program maupun kegiatan yang tengah dilakukan.

Inovasi tersebut harus dilakukan dengan mencari media penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien. Saat ini videografis maupun infografis menjadi salah satu bentuk penyampaian informasi yang dinilai lebih efektif dan efisien selain pembuatan siaran pers yang tentunya sumber resmi dan kredibel yang keluar dari sebuah lembaga/instansi. Melalui infografis dan videografis ini, berbagai konten informasi yang kompleks dikemas menjadi sebuah informasi dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Begitupun dengan videografis, informasi dalam bentuk animasi grafis dengan efek audio yang menarik diharapkan dapat menarik perhatian



masyarakat luas.

Total 117.504 publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dihitung berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Jumlah siaran pers yang ditayangkan di website Kementerian ESDM selama tahun 2019.

Press release atau siaran pers merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh *public relations* (humas) dalam suatu organisasi atau perusahaan/institusi/lembaga dan dikirimkan atau disiarkan kepada media (pers) sebagai bentuk kegiatan penyebaran informasi kepada publik. *Press release* sangat penting digunakan dalam kegiatan *public relations* untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Setiap informasi yang keluar dari Kementerian ESDM dibuat dalam bentuk *Press Release/Siaran Pers* yang menjadi rujukan kredibel bagi para media yang membuat berita seputar sektor ESDM.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah total siaran pers yang tayang pada website Kementerian ESDM adalah sebanyak **755** siaran pers yang memuat informasi seputar program, kebijakan, capaian dan informasi penting lainnya terkait seluruh sektor ESDM.

2. Infografis

Dalam penyampaian program dan kebijakan Kementerian ESDM, Biro Komunikasi, layanan Informasi Publik dan Kerja Sama selama tahun 2019, mempublikasikan kebijakan serta informasi melalui beberapa kanal komunikasi dan salah satu konten yang disebarkan berupa infografis. Infografis menjadi salah satu alternatif dalam penyampaian informasi yang dikemas secara ringan dan menarik sehingga meningkatkan minat para audience terhadap setiap postingan pada kanal-kanal komunikasi yang dimiliki.

Total infografis yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh Biro KLIK Kementerian ESDM berjumlah **362** buah. Penyampaian informasi yang dikemas menjadi sebuah infografis menumbuhkan dan menarik minat audience untuk membaca isu-isu seputar Kementerian ESDM.

3. Videografis.

Selain infografis, metode pengemasan informasi lainnya adalah dengan pembuatan videografis yang menjadi salah satu strategi kreatif dalam mempublikasikan kebijakan Kementerian ESDM. Videografis merupakan media untuk merekam suatu moment/kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara.

Total videografis yang telah dibuat selama tahun 2019 adalah sebanyak **115**.

4. Jumlah Pemberitaan terkait Kementerian ESDM.

Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi lainnya, dapat

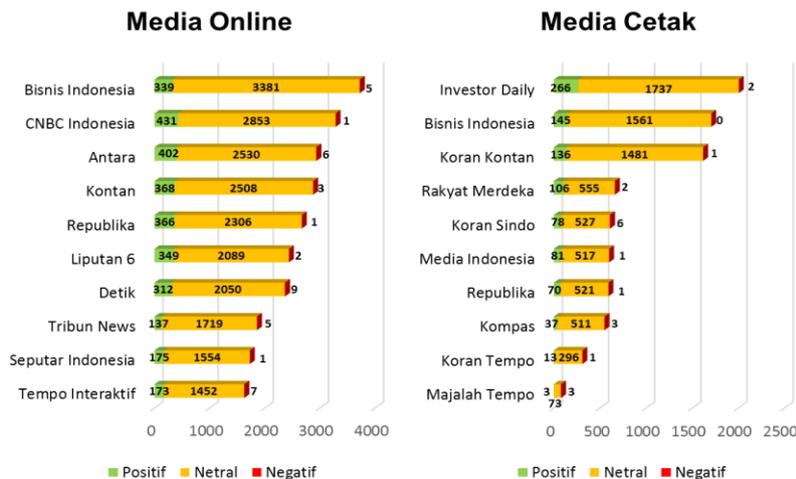


menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan KESDM. Biro KLIK bertanggung jawab untuk memantau pemberitaan yang terdapat di seluruh media yang memberitakan tentang Kementerian ESDM untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan terkait isu strategis masing-masing subsektor, tonasi/sentimen dan spoke person pada berita tersebut. Pada media Cetak dan online, pemberitaan yang dipantau berupa informasi tentang berita-berita pada media massa yang berkaitan dengan Sektor ESDM, meliputi antara lain: artikel, foto, opini masyarakat, *feature* dan surat pembaca. Sedangkan pada media televisi dan radio, informasi yang disediakan berupa berita-berita pada media televisi yang berkaitan dengan sektor ESDM, meliputi antara lain: *News, Talkshow, Features, Breaking News dan Running Text* dan Iklan.

Selama Januari hingga Desember 2019, tercatat total 116.613 yang terdiri dari 107.817 artikel berita di media online dan 8.796 artikel berita di media cetak dengan sentimen positif, netral dan negatif. Dalam perjanjian kinerja Biro KLIK, lingkup pemberitaan yang diperhitungkan hanya berita dengan tonasi positif dan netral saja sehingga jumlah keseluruhan pemberitaan sejumlah **116.272** berita.

Bisnis Indonesia menjadi media online yang paling vokal yakni 3.725 pemberitaan. Sedangkan Investor Daily menjadi yang paling vokal di media cetak yakni 2.005 artikel berita yang mengulas Kementerian ESDM dengan kecenderungan pemberitaan bertonasi netral.

Gambar 12. Pemberitaan Positif, Negatif, Netral pada Media Online dan Media Cetak



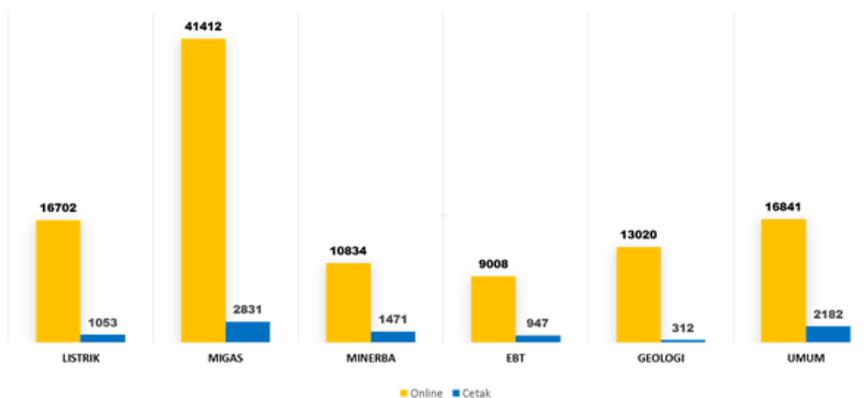


Isu utama yang paling disorot oleh media yakni terkait "Kendaraan Listrik" serta "Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi" kemudian "Distribusi BBM" dan "Pemadaman Listrik".

Tabel 32. Isu Utama yang disorot oleh Media

NO	Isu	Ekspose	Link
1	Kendaraan Listrik	7.099	https://www.suara.com/otomotif/2019/12/25/143500/pepres-terbit-2020-kendaraan-listrik-roda-dua-masih-butuh-persiapan
2	Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi	4.046	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190722202306-20-414522/pvmbg-catat-425-kali-gempa-embusan-di-gunung-tangkuban-parahu
3	Distribusi BBM	3.781	https://economy.okezone.com/read/2019/07/25/320/2083508/jokowi-pangkas-aturan-iuran-distribusi-bbm-dan-gas-cek-di-sini
4	Pemadaman Listrik	3.069	https://nasional.kompas.com/read/2019/08/09/21500961/tim-investigasi-polri-periksa-20-saksi-terkait-mati-listrik-massal
5	Harga BBM	1.963	https://www.liputan6.com/bisnis/read/3931594/rincian-terbaru-harga-bbm-pertamina-shell-dan-total
6	Distribusi LPG	1.783	https://katadata.co.id/berita/2019/07/18/pertamina-tambah-pasokan-lpg-40320-tabung-di-wonogiri
7	Jaringan Gas	1.741	https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916223/pemerintah-bakal-bangun-78126-jaringan-gas-rumah-tangga-di-18-kabupatenkota

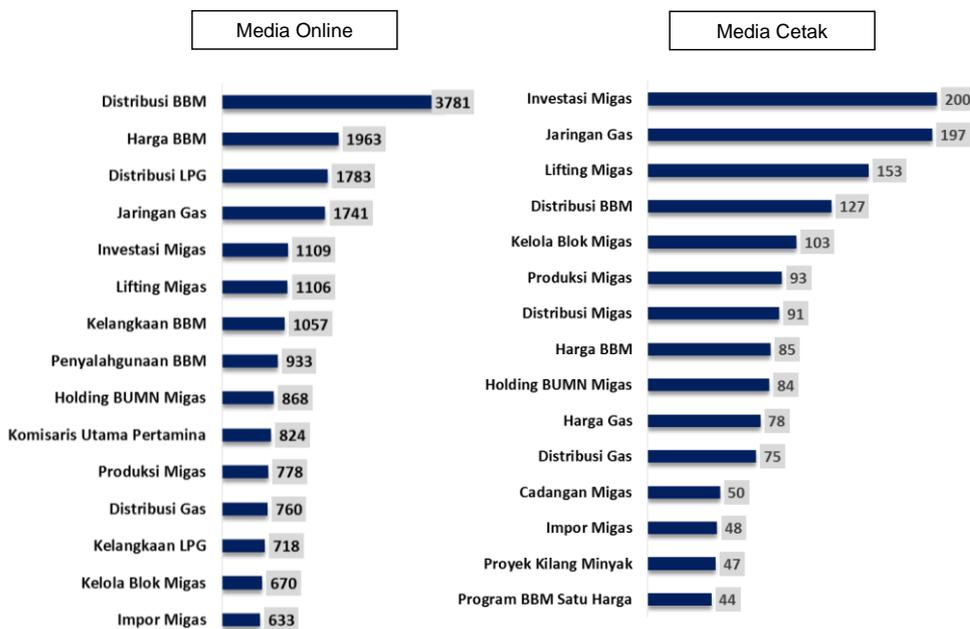
Pada pemberitaan di media online, subsektor migas memiliki pemberitaan paling banyak dengan jumlah pemberitaan sebanyak 41.412 berita.



Gambar 13. Pemberitaan yang disorot oleh Media Online



Isu-isu utama subsektor migas yang paling banyak diangkat oleh media online berupa distribusi BBM ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Terutama terkait dengan penyaluran bahan bakar bersubsidi ke daerah-daerah 3T (Terpencil, Terluar, Terdepan) dan seluruh regulasi yang menyertainya.



Gambar 14. Pemberitaan Sub Sektor Migas oleh Media Online dan Media Cetak

Sedangkan untuk media cetak, investasi migas menjadi isu yang paling banyak diberitakan sebanyak 200 pemberitaan. Media tersebut memberitakan seputar capaian investasi hulu migas, keterbukaan akses data migas, juga proyek-proyek strategis nasional yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas demi memenuhi konsumsi domestik.

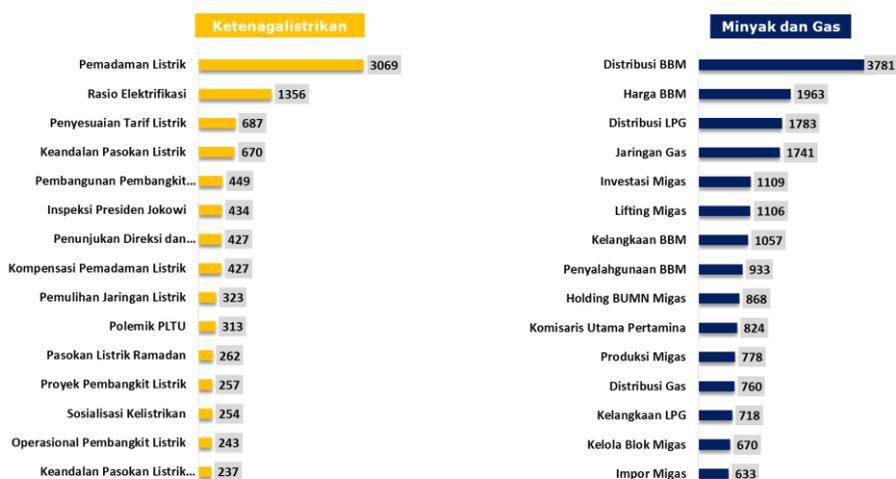
Adapun secara keseluruhan 15 isu utama disetiap sektor yang disorot media online yakni :

- a) Isu utama media online bidang Ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Pemadaman Listrik (3.061 berita), Rasio Elektrifikasi (1.356 berita), Penyesuaian Tarif Daftar Listrik (687 berita),



- Pembangunan Pembangkit (449 berita) dan Inspeksi Presiden Jokowi (434 berita).
- b) Isu utama media online bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Distribusi BBM (3.781 berita), Harga BBM (1.963 berita), Distribusi LPG (1.783 berita), Jaringan Gas (1.741 berita) dan Investasi Migas (1.109 berita).
 - c) Isu utama media online bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Izin Usaha Pertambangan (830 berita), Tambang Ilegal (826 berita), HBA (674 berita), Kinerja Emiten Tambang (585 berita) dan Produksi Batubara (500 berita).
 - d) Isu utama media online bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Pengembangan EBT (902 berita), Program Biodiesel (604 berita), Pembangunan PLTSa (547 berita), Uji Coba B30 (325 berita) dan Program B30 (320 berita).
 - e) Isu utama media online bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi (4.046 berita), Aktivitas Vulkanik G. Sinabung (1.467 berita), Aktivitas Vulkanik G. Agung (1.019 berita), Aktivitas Vulkanik Anak G. Krakatau (718 berita) dan Aktivitas Kegempaan (501 berita).
 - f) Isu utama media online bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Kendaraan Listrik (7.099 berita), Neraca Perdagangan (706 berita), CSR Emiten Energi (267 berita), Kasus Korupsi PLTU Riau (235 berita) dan Formula E Jakarta (218 berita).

Gambar 15. Lima Belas Isu Utama Media Online

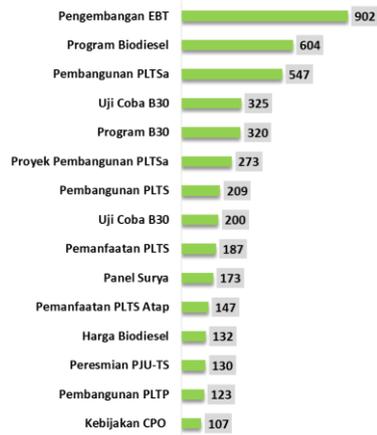




Minerba



EBTKE



Geologi



BLU dan Umum

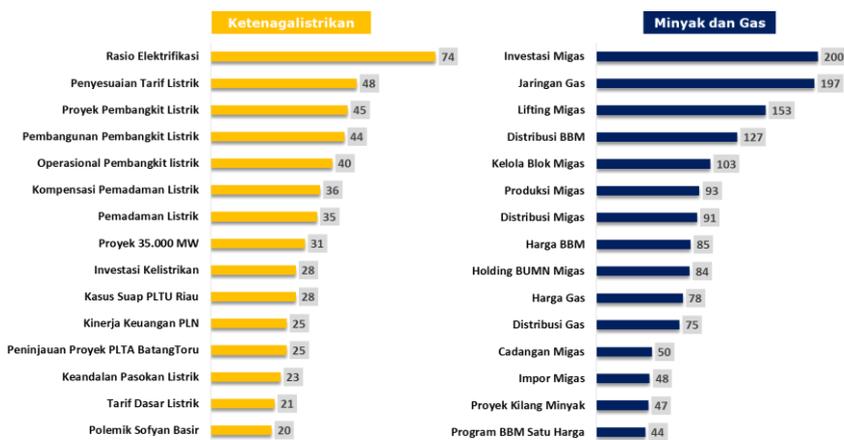


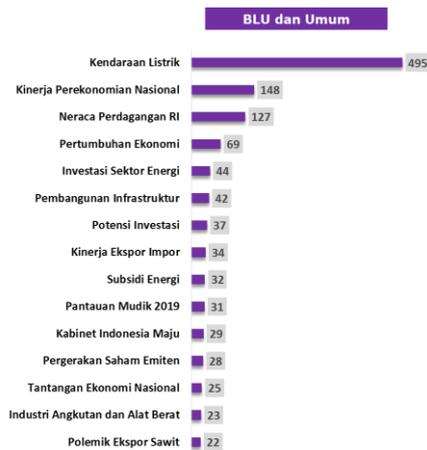
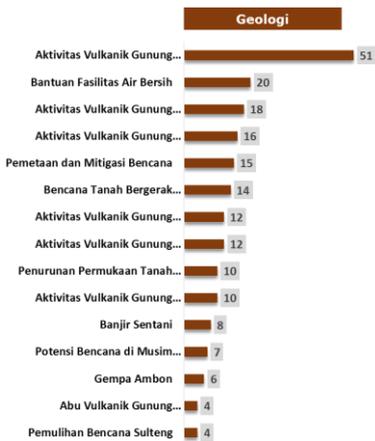
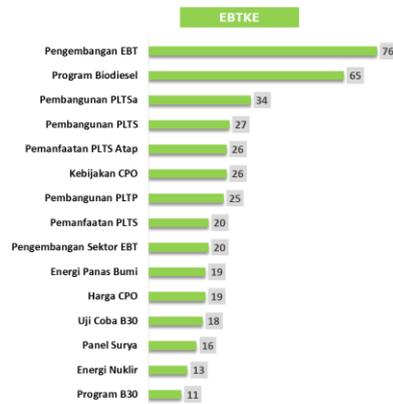
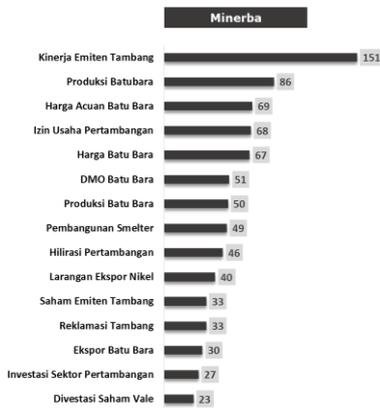


Sedangkan 15 isu utama disetiap sektor yang disorot media cetak:

- Isu utama media cetak bidang Ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Rasio Elektrifikasi (74 berita), Penyesuaian Tarif Listrik (48 berita), Proyek Pembangkit Listrik (45 berita), Pembangunan Pembangkit Listrik (44 berita) dan Operasional Pembangkit Listrik (40 berita).
- Isu utama media cetak bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Investasi Migas (200 berita), Jaringan Gas (197 berita), Lifting Migas (153 berita), Distribusi BBM (127 berita) dan Kelola Blok Migas (103 berita).
- Isu utama media cetak bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Kinerja Emiten Tambang (151 berita), Produksi Batubara (86 berita), Izin Usaha Pertambangan (69 berita), Harga Batubara (68 berita) dan DMO Batubara (67 berita).
- Isu utama media cetak bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Pengembangan EBT (76 berita), Program Biodiesel (65 berita), Pembangunan PLTSa (34 berita), Pemanfaatan PLTSa Atap (26 berita) dan Kebijakan CPO Sawit (26 berita).
- Isu utama media cetak bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Aktivitas Gunung Agung (51 berita), Bantuan Air Bersih (20 berita), Aktivitas Gunung Agung (18 berita), Aktivitas Gunung Sinabung (16 berita) dan Pemanfaatan Mitigasi Bencana (15 berita).
- Isu utama media cetak bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember): Pengembangan Kendaraan Listrik (495 berita), Perekonomian Nasional (148 berita), Neraca Perdagangan Indonesia (127 berita), Pertumbuhan Ekonomi (69 berita) dan Investasi Sektor Energi (44 berita).

Gambar 16. Lima Belas Isu Utama sektor ESDM pada Media Cetak

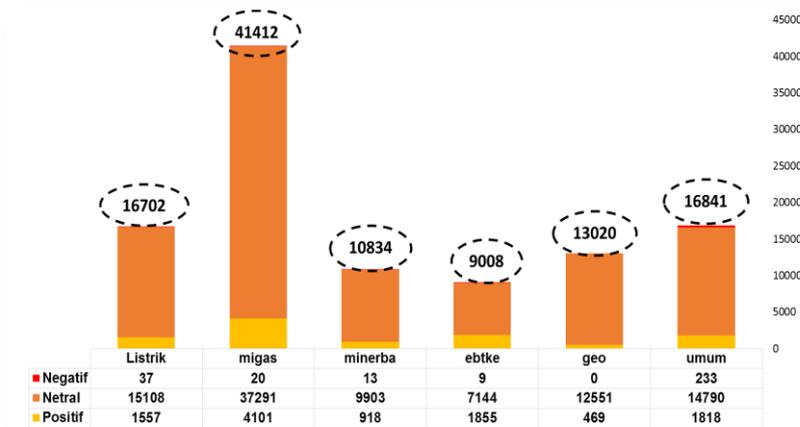




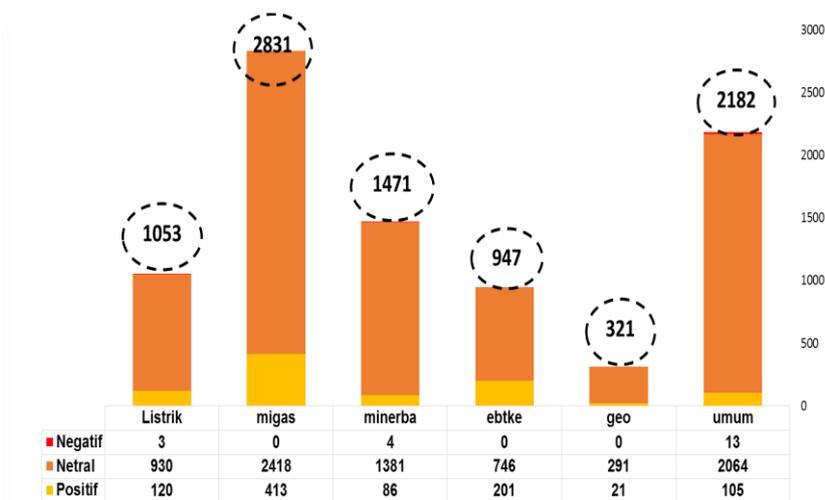
Sentimen pemberitaan media online pada topik Kementerian ESDM didominasi oleh sentimen netral dengan persentase 89,8%. Sementara pemberitaan positif mendapat persentase 9,9%, dan sentimen negatif 0,3%. Sedangkan media cetak proporsi pemberitaan juga didominasi oleh sentimen netral dengan persentase 89,0%. Untuk sentimen positif mendapat persentase sebesar 10,8%, dan untuk sentimen negatif 0,2%.



Gambar 17. Sentimen Media Online



Gambar 18. Sentimen Media Cetak





3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Anggaran per Eselon II

(Miliar Rp)

Unit	Pagu Total	Realisasi	%
Biro Hukum	6,08	6,04	99,29
Biro Sumber Daya Manusia	98,50	97,78	99,27
Biro Keuangan	10,13	10,08	99,47
Biro Perencanaan	10,08	9,88	98,00
Biro Umum	108,17	107,45	99,34
Pusat Data dan Teknologi Informasi	91,99	91,30	99,26
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	10,07	10,03	99,63
Biro Organisasi dan Tata Laksana	4,80	4,79	99,64
Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama	16,40	16,33	99,54
Jumlah	356,22	353,67	99,28

Realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 353,67 Miliar atau 99,285 dari pagu anggaran tahun 2019 yaitu Rp. 356,22 Miliar

Untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan baik oleh unit eselon II maupun satker Sekretariat Jenderal tercapai maka telah dilakukan upaya-upaya diantaranya:

- melakukan update berkala atas rencana pencairan dana pada seluruh unit,
- Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan mingguan,
- Melakukan kunjungan lapangan untuk memantau progres fisik atas pekerjaan strategis oleh tim Unit Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (UP3I),
- Menginventarisasi kendala pencapaian target akhir tahun 2019 dan mitigasi atas kendala yang dihadapi



Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai perencanaan strategis yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2015 – 2019.

4.1 *Capaian Indikator Kinerja*

Merujuk pada tabel di bawah ini yang berisi informasi ringkasan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja IKU dalam Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 11 Indikator yang ditetapkan sebanyak 7 indikator realiasi capaiannya di atas 100%, dan 1 indikator realiasi capaiannya antara 75%-100%. Serta 3 indikator yang belum mendapatkan nilai karena hasil penilaian akan diumumkan pada pertengahan tahun berikutnya. Secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal sebesar 123,4%.

Tabel 34. Ringkasan Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM	%	97	103	106
2	Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi KESDM	Predikat	BB	BB	100
3	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM	Predikat	BB	BB	100
4	Persentase realisasi PNBK KESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan	%	93	115,4	124,10



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	Predikat	WTP	WTP	100
6	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional	Peraturan	30	48	160
7	Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	Kasus	6	10	167
8	Indeks Kepuasan Stakeholder Layanan Umum	%	75	80	106
9	Persentase Pemanfaatan Data Spasial dan Non-spasial Terintegrasi	%	95	95	100
10	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	%	95	100	105
11	Jumlah Publikasi Informasi sektor ESDM	Publikasi	62.150	117.504	189

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2019 terdapat 11 indikator kinerja yang ditargetkan untuk diwujudkan dalam Tahun 2019. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja ini menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Merujuk pada tabel di atas terdapat beberapa Indikator kinerja sasaran yang realisasi capaiannya di atas 100%, beberapa diantaranya yaitu: (1) Jumlah Publikasi Informasi Sektor ESDM 189%; (2) Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional 160%; (3) Persentase realisasi PNBPN terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan 124,10%

Sedangkan indikator sasaran strategis yang realisasi capaiannya antara 75%-100%, yaitu : (1) Persentase pemanfaatan data spasial dan non-spasial 100.

Untuk indikator yang belum mendapatkan nilai ada 3 indikator, hal ini terkait dengan Tim penilai dari luar Kementerian ESDM yang pengumuman dari hasil penilaiannya diumumkan pada pertengahan tahun, yaitu (1). Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM untuk tahun 2018; (2). Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM dan (3) Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi KESDM.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ego Syahril

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Pihak Pertama,

Sekretaris Jenderal

Ego Syahril



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Persentase manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM	97%
Meningkatnya kualitas penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen perubahan	Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi KESDM	BB
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor ESDM yang efektif dan efisien	Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM	BB
Terwujudnya administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM	1. Persentase realisasi PNBPKESDM terhadap target yang ditetapkan tahun berjalan	93%
	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	WTP
Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi KESDM	1. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas Nasional	30 Peraturan
	2. Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian	6 Kasus
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> Layanan Umum	75



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Persentase pemanfaatan data spasial dan non-spasial terintegrasi	95%
Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel	Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya	95%
Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM	Jumlah publikasi informasi sektor ESDM	62.150 Publikasi

Jumlah Anggaran : Rp. 342.456.898,-
(tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Jakarta,
Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Ego Syahril